



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu di bidang pelayanan kesehatan membutuhkan peran serta masyarakat, sehingga merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tarif pelayanan kesehatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364 Tahun 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Jasa Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 tahun 2007 tentang Kejadian Luar Biasa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 16) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin.
4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah perangkat pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
9. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap.
10. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah perangkat pembantu pelaksana teknis Puskesmas Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda empat, roda dua atau alat transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan lainnya dan atau dilokasi yang sering terjadi bencana.
12. Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) adalah sarana pelayanan kesehatan ditingkat kelurahan yang merupakan wujud Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat wilayah setempat atas dasar musyawarah dalam rangka pendekatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kelurahan yang meliputi promotif, preventif dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan kader atau tenaga sukarelawan lainnya.
13. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat pengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
14. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa penyakit, pengobatan, perawatan, pemulihan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya serta pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap puskesmas dan jaringannya.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap puskesmas dan jaringannya selama lebih dari 6 (enam) jam.
18. Pelayanan Rawat Inap Umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang datang ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap puskesmas dan jaringannya selama lebih dari 6 (enam) jam untuk semua penyakit.
19. Pelayanan Pengobatan Umum adalah upaya penyembuhan, pemulihan pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
20. Pelayanan Pengobatan Gigi dan Mulut adalah upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.

21. Pelayanan Penunjang Medik/ Diagnostik adalah pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk menunjang penegakan diagnosa penyakit atau pengobatan.
22. Pelayanan Konsultasi Kesehatan adalah pelayanan konseling berkaitan dengan masalah kesehatan secara individu.
23. Pelayanan Spesialis adalah pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis.
24. Pelayanan Psikologi adalah pelayanan psikologi oleh psikolog klinis.
25. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
26. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi perempuan yang melahirkan oleh dokter, dokter spesialis, bidan dan perawat bayi baru lahir.
27. Pelayanan Gizi Buruk Tanpa Komplikasi adalah pemulihan gizi buruk tanpa komplikasi di Pusat Pemulihan Gizi Puskesmas.
28. Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer adalah pelayanan kesehatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik.
29. Tindakan adalah suatu kegiatan yang dialami penderita, mengandung resiko, selain mendapatkan obat yang memerlukan keterampilan khusus untuk pelaksanaannya. Kegiatan ini diperlukan sebagai bagian yang menunjang proses pengobatan dan penyembuhan.
30. Tindakan medik adalah tindakan yang menyangkut kegiatan pengobatan tanpa alat bantu pisau bedah termasuk tindakan gigi.
31. Tindakan bedah adalah bagian dari tindakan medik yang menyangkut kegiatan pengobatan atau penegakan diagnosa dengan alat bantu bedah dan alat bantu lainnya.
32. Tindakan fisioterapi adalah tindakan pelayanan rehabilitasi medik (melalui latihan-latihan fisik dan penyinaran) dalam menunjang penyembuhan.
33. Radiologi adalah alat penunjang diagnostik yang menggunakan sinar - X.
34. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
35. Surat Keterangan Kesehatan adalah surat keterangan yang menunjukkan status kesehatan seseorang berupa surat keterangan sehat, sakit, calon pengantin, kehamilan/melahirkan, kematian dan surat keterangan kesehatan lainnya.

36. Mobil Ambulance adalah alat transportasi dengan alat kesehatan yang digunakan untuk mengantar /mengirim pasien rujukan medik dan pelayanan kesehatan lain yang diberikan kepada pasien.
37. Mobil Pusling adalah alat transportasi Puskesmas Keliling yang dilengkapi dengan alat kesehatan dan digunakan untuk pelayanan kesehatan keliling.
38. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
39. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.
40. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan oleh puskesmas dan jaringannya serta laboratorium daerah.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
42. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di puskesmas dan jaringannya serta Laboratorium Kesehatan Daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
44. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mengisi data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

Obyek retribusi pelayanan kesehatan dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan
 - 1) Pelayanan Pengobatan Umum;
 - 2) Pelayanan Pengobatan dan Tindakan Gigi dan Mulut;
 - 3) Pelayanan Tindakan Medik;
 - 4) Pelayanan Penunjang Medik/ Diagnostik;
 - 5) Pelayanan Konsultasi Kesehatan;

- 6) Pelayanan Spesialis;
 - 7) Pelayanan Psikologi;
 - 8) Pelayanan Pengobatan Alternatif dan Komplementer;
 - 9) Pelayanan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Membawa Jenazah Keluar Daerah;
 - 10) Pelayanan Mobil Ambulance/ Pusling.
- b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
- 1) Pelayanan Rawat Inap Umum;
 - 2) Pelayanan Persalinan dan/ atau Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - 3) Pelayanan Gizi Buruk (Pusat Pemulihan Gizi).
- c. Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 6

- (1) Dikecualikan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5, untuk pemeriksaan laboratorium dasar dan pelayanan tindakan gigi di Puskesmas dan jaringannya dijamin oleh pemerintah Kota Banjarmasin dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penduduk kota Banjarmasin yang tidak terdaftar dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan seperti ASKES PNS, ASKES Sosial, Asabri, Jamsostek, Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda dan jaminan kesehatan lainnya;
 - b. syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang berusia di atas 17 tahun dan Kartu Keluarga bagi yang berusia di bawah 17 tahun. Bagi pelajar dengan menunjukkan kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah;
 - c. bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana huruf a diwajibkan menunjukkan kartu kepesertaannya.
- (2) Pemeriksaan laboratorium dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Hematologi, Urinalisa dan Faeses
 - b. penyakit TB Paru (Sputum/ BTA perslide);
 - c. penyakit Kusta (Hansen BTA (Paket));
 - d. penyakit Malaria (Malaria mikroskopis dan Malaria stik);
 - e. penyakit DBD (Hematokrit dan Trombosit);
 - f. penyakit Filariasis (Mikrofilaria mikroskopis);
 - g. penyakit Infeksi Menular Seksual (Sifilis (VDRL/RPR) dan HIV).
- (3) Pelayanan tindakan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. cabut gigi susu;
 - b. cabut gigi susu dengan komplikasi;
 - c. cabut gigi tetap seri, taring, premolar 1 & 2, molar 1 & 2;
 - d. cabut gigi tetap molar 3;

- e. cabut gigi tetap dengan penyulit;
- f. perawatan pulpa capping dan Trepanasi;
- g. tumpatan sementara;
- h. tumpatan glass ionomer;
- i. buang karang gigi manual per regio;
- j. perawatan saluran akar.

(4) Pelayanan Kesehatan sebagaimana Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan retribusi sesuai tarif yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini. Pelayanan Kesehatan yang dikenakan retribusi adalah :

- a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan
 - 1) Pelayanan Tindakan Gigi;
 - 2) Pelayanan Tindakan Medik;
 - 3) Pelayanan Penunjang Medik/ Diagnostik (kecuali pemeriksaan laboratorium dasar);
 - 4) Pelayanan Psikologi;
 - 5) Pelayanan Pengobatan Alternatif dan Komplementer;
 - 6) Pelayanan Surat Keterangan Sehat (kecuali surat keterangan kesehatan untuk pelajar) dan Surat Keterangan Membawa Jenazah Keluar Daerah;
 - 7) Pelayanan Mobil Ambulance/ Pusling;
- b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
 - 1) Pelayanan Rawat Inap Umum;
 - 2) Pelayanan Persalinan dan/ atau Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - 3) Pelayanan Gizi Buruk (Pusat Pemulihan Gizi).
- c. Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

(5) Bagi penduduk luar kota Banjarmasin yang berobat di Puskesmas dan jaringannya dikenakan retribusi.

(6) Komponen tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) terdiri atas :

- a. Jasa Pelayanan;
- b. Jasa Sarana.

4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

Besarnya retribusi yang dikenakan kepada Subjek Retribusi adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

- 6. Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XI A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB XI A
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

“Pasal 13 A

Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- 7. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB XII A
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

“Pasal 14 A

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

- 8. Diantara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB XIII A
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

“Pasal 15 A

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi atau pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

- 9. Diantara Bab XIII A dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII B, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB XIII B
KEBERATAN**

“Pasal 15 B

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada hanya kepada Walikota atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

“Pasal 15 C

- (1) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menertibkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Kepada Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

“Pasal 15 D

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

10. Diantara Bab XIII B dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII C
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

"Pasal 15 E

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Terhitung sejak tanggal diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah, dan mempersiapkan segala sarana dan prasarana sebelum peraturan ini efektif diberlakukan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2014



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 April 2014

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 



H. ZULFADLI GAZALI 

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Sejalan dengan peningkatan sarana prasarana di Puskesmas serta semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka jajaran kesehatan harus mampu memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional kepada masyarakat.

Bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan tersebut, dipandang perlu menetapkan penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan dan menambah jenis pelayanan kesehatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Fungsi Sosial Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan adalah memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga penetapan biaya harus memperhitungkan kemampuan semua komponen masyarakat.
3. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan diusulkan berdasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang tersedia di Puskesmas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI			Keterangan
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
I.	Rawat Jalan di Puskesmas dan Jaringannya				
	1. Rawat jalan dokter umum	5,000	3,000	2,000	
	2. Rawat jalan dokter gigi	5,000	3,000	2,000	
	3. Rawat jalan pelayanan dokter spesialis	15,000	9,000	6,000	
	4. Rawat jalan pelayanan dokter spesialis luar	20,000	16,000	4,000	
II.	Perawatan Gigi				
	1. Cabut gigi susu	6,000	3,600	2,400	
	2. Cabut gigi susu dengan komplikasi	7,000	4,200	2,800	
	3. Cabut gigi tetap seri, taring	8,000	4,800	3,200	
	4. Cabut gigi premolar 1 & 2	9,000	5,400	3,600	
	5. Cabut gigi tetap molar 1 & 2	10,000	6,000	4,000	
	6. Cabut gigi tetap molar 3	11,000	6,600	4,400	
	7. Cabut gigi tetap dengan penyulit	12,000	7,200	4,800	
	8. Cabut gigi tetap dengan cito jet	30,000	13,200	16,800	
	9. Perawatan pulpa capping dan Trepanasi	6,000	2,640	3,360	
	10. Tumpatan sementara	6,000	2,640	3,360	
	11. Tumpatan glass ionomer	9,000	3,960	5,040	
	12. Tumpatan light cure	40,000	17,600	22,400	
	13. Buang karang gigi manual per regio	15,000	9,000	6,000	
	14. Buang karang gigi ultrasonik	20,000	8,800	11,200	
	15. Incisi abscess	9,000	3,960	5,040	
	16. Operculectomy	12,000	5,280	6,720	
	17. Koreksi oklusi	7,500	3,300	4,200	
	18. Perawatan saluran akar	8,000	3,520	4,480	
III.	Tindakan Medik				
	1. Debridement per luka	10,000	4,400	5,600	
	2. Jahit luka luar				
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	15,000	9,000	6,000	
	b. Jahit luka 6-10 jahitan	20,000	12,000	8,000	
	c. Jahit luka > 10 jahitan	25,000	15,000	10,000	
	3. Jahit luka dalam				
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	30,000	18,000	12,000	
	b. Jahit luka 6-10 jahitan	50,000	30,000	20,000	
	c. Jahit luka > 10 jahitan	70,000	42,000	28,000	
	4. Lepas jahitan				
	a. Lepas jahitan 1-5 jahitan	5,000	3,000	2,000	
	b. Lepas jahitan 6-10 jahitan	10,000	6,000	4,000	
	5. Bedah minor				
	a. Atheroma	75,000	45,000	30,000	
	b. Lipoma	50,000	30,000	20,000	
	c. Clavus/Callus	75,000	45,000	30,000	
	d. Telinga Dawir	25,000	15,000	10,000	
	e. Circumsisi	100,000	60,000	40,000	
	6. Perawatan luka bakar				
	a. Perawatan luka bakar < 10%	20,000	8,800	11,200	
	b. Perawatan luka bakar > 10% Tidak kompleks	30,000	13,200	16,800	
	7. Mengobati luka excoriasi/ lecet	7,000	4,200	2,800	
	8. Ganti perban	5,000	3,000	2,000	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
	9. Tindik daun telinga	15,000	9,000	6,000	
	10. Incisi	15,000	9,000	6,000	
	11. Eksisi	25,000	15,000	10,000	
	12. Ekstraksi kuku	25,000	15,000	10,000	
	13. Ekstraksi corpus alineum				
	a. Telinga	10,000	6,000	4,000	
	b. Hidung	10,000	6,000	4,000	
	14. Suntikan ATS/SABU (tidak termasuk Vaksin)	20,000	12,000	8,000	
	15. Pemeriksaan tonometer	7,500	4,500	3,000	
	16. Pasang kateter	25,000	15,000	10,000	
	17. Lepas kateter	10,000	6,000	4,000	
	18. Pasang infuse	15,000	9,000	6,000	
	19. Pemberian oksigen / liter / jam	10,000	6,000	4,000	
	20. Pemasangan spalk	25,000	15,000	10,000	
	21. Pemakaian nebulizer	35,000	21,000	14,000	
IV.	Tindakan Obstetri dan Ginekologi				
	1. Pemasangan IUD	30,000	18,000	12,000	
	2. Pelepasan IUD	20,000	12,000	8,000	
	3. Pemasangan implant	30,000	18,000	12,000	
	4. Pelepasan implant	40,000	24,000	16,000	
	5. Persalinan normal di Puskesmas dan jaringannya	500,000	300,000	200,000	
	6. Biaya pengambilan pap smear / IVA	15,000	6,600	8,400	
	7. Senam Hamil	10,000	6,000	4,000	
V.	Tindakan Fisioterapi				
	1. Tindakan I (1 areal yang diterapi)	7,500	3,300	4,200	
	2. Tindakan II (2 areal yang diterapi)	21,000	9,240	11,760	
	3. Tindakan III (2 areal plus manual terapi)	27,000	11,880	15,120	
	4. Tindakan IV (>3 areal plus manual terapi)	35,000	15,400	19,600	
	5. Paket	50,000	22,000	28,000	
VI.	Surat Keterangan Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan				
	1. Pemeriksaan kesehatan umum	5,000	3,000	2,000	
	2. Calon pengantin	10,000	4,400	5,600	
	3. Pendidikan/ penataran bagi PNS	10,000	6,000	4,000	
	4. Surat keterangan sakit	5,000	3,000	2,000	
	5. Surat ijin pengambilan data penelitian				
	a. D III	10,000	6,000	4,000	
	b. S1	15,000	9,000	6,000	
	c. S2	20,000	12,000	8,000	
	d. S3	30,000	18,000	12,000	
	6. Keterangan kehamilan/persalinan	10,000	6,000	4,000	
	7. Surat keterangan tidak buta warna	10,000	6,000	4,000	
	8. Surat keterangan tidak bertato	10,000	6,000	4,000	
	9. Surat keterangan tidak bertindik	10,000	6,000	4,000	
	10. Surat Keterangan lansia	5,000	3,000	2,000	
	11. Surat Keterangan tidak pakai kacamata	10,000	6,000	4,000	
	12. Surat Keterangan Tidak Juling/ Strabismus	10,000	6,000	4,000	
	13. Surat Keterangan Bumil/ Bayi Naik Pesawat	10,000	6,000	4,000	
	14. Surat Keterangan Tidak Ada Varises	5,000	3,000	2,000	
	15. Surat Keterangan Bebas Narkoba	10,000	6,000	4,000	
VII.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik				
	1. Radiologi				
	a. Film 35 x 35	40,000	17,600	22,400	
	b. Film 24 x 30	30,000	13,200	16,800	
	c. Jasa Baca Hasil	15,000	15,000	0	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
	2. Radiologi Gigi				
	a. Film	15,000	6,600	8,400	
	3. Elektro Kardio Graf (EKG)				
	a. Pemeriksaan EKG	15,000	6,600	8,400	
	b. Jasa Baca Hasil	10,000	10,000	0	
	4. Ultra Sono Grafi (USG)				
	a. Pemeriksaan USG	50,000	22,000	28,000	
	5. Refraksi Mata	10,000	6,000	4,000	
	6. Slit lamp	20,000	12,000	8,000	
VIII.	Pelayanan Psikologi				
	a. Anak dan Remaja				
	1. Tes kesiapan masuk TK/SD	25,000	11,000	14,000	
	2. Tes kecerdasan TK 4 ½ - 5 ½ tahun	60,000	26,400	33,600	
	3. Tes kecerdasan SD-SMP-SLTA	60,000	26,400	33,600	
	4. Tes bakat	25,000	11,000	14,000	
	5. Tes minat	25,000	11,000	14,000	
	6. Pemilihan jurusan pendidikan	30,000	13,200	16,800	
	7. Tes kepribadian	75,000	33,000	42,000	
	8. Konsultasi masalah psikologi (1x pertemuan)	15,000	9,000	6,000	
	9. Konseling /psikoterapi	40,000	24,000	16,000	
	b. Dewasa				
	1. Tes kecerdasan	50,000	22,000	28,000	
	2. Tes kepribadian	75,000	33,000	42,000	
	3. Seleksi Promosi, mutasi karyawan biasa	60,000	26,400	33,600	
	4. Seleksi promosi, mutasi Middle Management	80,000	35,200	44,800	
	5. Seleksi promosi, mutasi Top Management	125,000	55,000	70,000	
	6. Konsultasi masalah psikologi (1x pertemuan)	18,000	7,920	10,080	
	7. Konseling /psikoterapi	40,000	24,000	16,000	
	8. Pemeriksaan MMPI	85,000	34,000	51,000	
IX.	Pemeriksaan Calon Jamaah Haji dan Umroh				
	1. Pemeriksaan Kesehatan CJH Reguler diluar penunjang				
	a. Laki Laki	73,000	32,120	40,880	
	b. Perempuan	79,500	34,980	44,520	
	2. Pemeriksaan Kesehatan CJH Plus				
	a. Laki Laki	325,000	143,000	182,000	
	b. Perempuan	331,500	145,860	185,640	
	3. Pemeriksaan Kesehatan Umroh				
	a. Laki Laki	475,000	209,000	266,000	
	b. Perempuan	481,500	211,860	269,640	
X.	Pelayanan Konsultasi Kesehatan				
	1. Sanitasi	5,000	3,000	2,000	
	2. Gizi	5,000	3,000	2,000	
	3. Farmasi	5,000	3,000	2,000	
	4. KIA-KB	5,000	3,000	2,000	
	5. Remaja	5,000	3,000	2,000	
XI.	Pelayanan Lainnya				
	1. Test kebugaran	10,000	4,400	5,600	
	2. Pemakaian Mobil Pusling				
	a. Pemakaian s/d 10 Km	35,000	21,000	14,000	
	b. Pemakaian > 10 Km (dihitung tambahan/Km)	5,000	4,500	500	
	3. Surat keterangan membawa mayat keluar daerah	100,000	60,000	40,000	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
XII.	Rawat Inap				
	1. Visite dokter spesialis luar	60,000	48,000	12,000	
	2. Konsul via telpon dokter spesialis	20,000	18,000	2,000	
	3. Visite dokter umum	10,000	6,000	4,000	
	4. Jaga perawat / bidan	10,000	6,000	4,000	
	5. Akomodasi / hari	40,000	24,000	16,000	
XIII.	UGD				
	1. Pemeriksaan dokter jaga	15,000	9,000	6,000	
XIV.	Pelayanan Alternatif dan Komplementer				
	1. Akupresur	10,000	6,000	4,000	
	2. Akupuntur dan alat	25,000	15,000	10,000	
	3. Pijat Bayi	10,000	6,000	4,000	
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
I.	KIMIA KESEHATAN				
	A. Kimia Lingkungan				
	I. Fisika				
	1. Bau	7,000	2,800	4,200	
	2. Rasa	7,000	2,800	4,200	
	3. Suhu	7,000	2,800	4,200	
	4. Warna	22,000	8,800	13,200	
	5. DHL/Daya Hantar Listrik	22,000	8,800	13,200	
	6. TSS/Zat tersuspensi	23,000	9,200	13,800	
	7. TDS/Zat Padat Terlarut	23,000	9,200	13,800	
	8. Kekeruhan	28,000	11,200	16,800	
	II. Kimia				
	1. Besi terlarut (Fe)	35,000	14,000	21,000	
	2. Mangan	45,000	18,000	27,000	
	3. Seng	60,000	24,000	36,000	
	4. Timbal	45,000	18,000	27,000	
	5. Tembaga	45,000	18,000	27,000	
	6. Crom + 6	45,000	18,000	27,000	
	7. Arsen	110,000	44,000	66,000	
	8. Raksa	110,000	44,000	66,000	
	9. Selenium	110,000	44,000	66,000	
	10. Clorida	35,000	14,000	21,000	
	11. Magnesium	30,000	12,000	18,000	
	12. COD	70,000	28,000	42,000	
	13. BOD	60,000	24,000	36,000	
	14. Fenol	60,000	24,000	36,000	
	15. Sianida	35,000	14,000	21,000	
	16. Aluminium	30,000	12,000	18,000	
	17. Barium	56,000	22,400	33,600	
	18. Flourida	35,000	14,000	21,000	
	19. Cadmium	35,000	14,000	21,000	
	20. Kesadahan CaCO3	25,000	10,000	15,000	
	21. Natrium	45,000	18,000	27,000	
	22. Nitrit	45,000	18,000	27,000	
	23. Nitrat	40,000	16,000	24,000	
	24. Perak	45,000	18,000	27,000	
	25. PH	15,000	6,000	9,000	
	26. Sulfat (SO4)	50,000	20,000	30,000	
	27. Sulfida (H2S)	36,000	14,400	21,600	
	28. DO/Oksigen terlarut	30,000	12,000	18,000	
	29. TOC	60,000	24,000	36,000	
	30. Minyak / Lemak	38,000	15,200	22,800	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
	31. Boron	95,000	38,000	57,000	
	32. Nikel	70,000	28,000	42,000	
	33. Kobal	70,000	28,000	42,000	
	34. Sodium Absorbtion Ratio/SAR	25,000	10,000	15,000	
	35. Zat Organik	35,000	14,000	21,000	
	36. Amoniak	35,000	14,000	21,000	
	37. N-Total	50,000	20,000	30,000	
	38. Formalin	45,000	18,000	27,000	
	39. Sisa Chlor	10,000	4,000	6,000	
	40. Ozone	45,000	18,000	27,000	
	41. Calsium	40,000	16,000	24,000	
	42. Fosfor	40,000	16,000	24,000	
	43. Total Alkali	20,000	8,000	12,000	
	44. Deterjen	44,000	17,600	26,400	
	45. Silikat	20,000	8,000	12,000	
	46. Aciditas	20,000	8,000	12,000	
	47. Borax	45,000	18,000	27,000	
	48. Siklamat	45,000	18,000	27,000	
	49. Sakarin	45,000	18,000	27,000	
	50. Pewarna Makanan Sintetis	105,000	42,000	63,000	
	51. Salinitas	15,000	6,000	9,000	
	52. Arsenic	85,000	34,000	51,000	
	53. Methyl Yellow	45,000	18,000	27,000	
	54. Rhodamin B.	45,000	18,000	27,000	
	III. Fisika Air				
	1. Debit	35,000	14,000	21,000	
	2. Sedimen	30,000	12,000	18,000	
	3. Kecepatan Arus	30,000	12,000	18,000	
	IV. Udara Ambient dan Emisi				
	1. Total Suspendeds Partical	85,000	34,000	51,000	
	2. Carbon Monoksida (CO)	45,000	18,000	27,000	
	3. Oksida Sulfur (SO)	45,000	18,000	27,000	
	4. Ozon/ Oksidan (O)	45,000	18,000	27,000	
	5. Oksida Nitrogen (NO)	45,000	18,000	27,000	
	6. Nitrogen Monoksida	45,000	18,000	27,000	
	7. Hidrokarbon (HC)	45,000	18,000	27,000	
	8. Total Hidrokarbon (nMHC)	45,000	18,000	27,000	
	9. Logam-Logam dalam Debu	130,000	52,000	78,000	
	V. Pemeriksaan Fisika Lainnya				
	1. Pencahayaan	10,000	4,000	6,000	
	2. Kebisingan	45,000	18,000	27,000	
	3. Getaran	125,000	50,000	75,000	
	4. Suhu	10,000	4,000	6,000	
	5. Kelembaban	10,000	4,000	6,000	
	VI. Jenis Paket Pemeriksaan				
	1. Limbah Cair Industri Minyak Sawit	210,000	84,000	126,000	
	2. Limbah Cair Industri Karet	193,000	77,200	115,800	
	3. Limbah Cair Industri Gula	228,000	91,200	136,800	
	4. Limbah Cair Industri Kayu Lapis	175,000	70,000	105,000	
	5. Limbah Cair Industri Minuman Ringan	231,000	92,400	138,600	
	6. Limbah Cair Industri Makanan	220,000	88,000	132,000	
	7. Limbah Cair Hotel	273,000	109,200	163,800	
	8. Limbah Cair Rumah Sakit	196,000	78,400	117,600	
	9. Limbah Cair Domestik	273,000	109,200	163,800	
	10. Limbah Cair Batubara	275,000	110,000	165,000	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
	B. Toksikologi				
	1. Napza Metamphetamine	40,000	16,000	24,000	
	2. Napza Benzodiazepine	40,000	16,000	24,000	
	3. Napza Opiate	40,000	16,000	24,000	
	4. Napza Canabinoieda	40,000	16,000	24,000	
	5. Etanol	150,000	60,000	90,000	
	II. MIKROBIOLOGI				
	A. Bidang Mikrobiologi				
	1. TPC	60,000	24,000	36,000	
	2. MPN Coliform	60,000	24,000	36,000	
	3. MPN Coli Tinja	60,000	24,000	36,000	
	4. Escherichia Coli	60,000	24,000	36,000	
	5. Salmonella spp	60,000	24,000	36,000	
	6. Shigella spp	60,000	24,000	36,000	
	7. Stapylococcus spp	60,000	24,000	36,000	
	8. Streptococcus spp	60,000	24,000	36,000	
	9. Vibrio Cholera	60,000	24,000	36,000	
	10. Jamur/yeast biakan	60,000	24,000	36,000	
	11. BTA per slide	5,000	2,000	3,000	
	12. P. Gram	10,000	4,000	6,000	
	13. Hansen BTA (paket)	15,000	6,000	9,000	
	14. Sel Ragi/ Yeast	60,000	24,000	36,000	
	15. Angka Kuman	60,000	24,000	36,000	
	B. Parasitologi				
	1. Malaria Mikroskopis	10,000	4,000	6,000	
	2. Mikrofilaria Mikroskopis	15,000	6,000	9,000	
	3. Bentos	60,000	24,000	36,000	
	4. Plankton	80,000	32,000	48,000	
	5. Jamur	10,000	4,000	6,000	
	III. IMUNOLOGI/SEROLOGI				
	1. Widal Test	25,000	10,000	15,000	
	2. Hepatitis B Aglutinasi (HBs-Ag)	25,000	10,000	15,000	
	3. Hepatitis B Antibodi (HBs-AB)	25,000	10,000	15,000	
	4. HCV	50,000	20,000	30,000	
	5. VDRL (Sfilis)	35,000	14,000	21,000	
	6. HIV	50,000	20,000	30,000	
	7. Rheumatoid Faktor (RAF)	25,000	10,000	15,000	
	8. TPHA	55,000	22,000	33,000	
	9. CRP	55,000	22,000	33,000	
	10. Asto	25,000	10,000	15,000	
	11. DHF (IgG, IgM)	80,000	32,000	48,000	
	IV. PATOLOGI				
	A. Hematologi				
	1. Hematologi Analizer	45,000	18,000	27,000	
	2. MCV	5,000	2,000	3,000	
	3. MCH	5,000	2,000	3,000	
	4. MCHC	5,000	2,000	3,000	
	5. Hit Jumlah Eosinofil	4,000	1,600	2,400	
	6. Retikulosit, HIT Jumlah	4,500	1,800	2,700	
	7. CT (waktu perdarahan)	7,500	3,000	4,500	
	8. BT (waktu pembekuan)	5,000	2,000	3,000	
	9. Morfologi Sel	15,000	6,000	9,000	
	10. Limposit Plasma Biru	4,000	1,600	2,400	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
	B. Kimia Klinik				
	a. Karbohidrat				
	1. Glukosa sewaktu	10,000	4,000	6,000	
	2. Glukosa Puasa	10,000	4,000	6,000	
	3. Glukosa, Kurva toleransi Glukosa 3x /5x	10,000	4,000	6,000	
	4. HbA1C	80,000	32,000	48,000	
	b. Lemak				
	1. Kolesterol Total	12,000	4,800	7,200	
	2. Trigliserida	20,000	8,000	12,000	
	3. HDL Kolesterol	20,000	8,000	12,000	
	4. LDL Kolesterol	10,000	4,000	6,000	
	5. Fosfolipid/serebrosit, sfingolipid	10,000	4,000	6,000	
	c. Fungsi Liver				
	1. Total Protein	12,000	4,800	7,200	
	2. Albumin	12,000	4,800	7,200	
	3. Globulin	10,000	4,000	6,000	
	4. Bilirubin Total & Direk	30,000	12,000	18,000	
	5. SGOT/AST	15,000	6,000	9,000	
	6. SGPT/ALT	15,000	6,000	9,000	
	7. Alkali Phosphatase/AP	15,000	6,000	9,000	
	8. Gamma GT/GGT	20,000	8,000	12,000	
	9. Amylase	45,000	18,000	27,000	
	10. Lipase	110,000	44,000	66,000	
	11. LDH	20,000	8,000	12,000	
	d. Fungsi Ginjal				
	1. Ureum	15,000	6,000	9,000	
	2. Kreatinin	10,000	4,000	6,000	
	3. Asam Urat	15,000	6,000	9,000	
	e. Fungsi Jantung				
	1. GLDH	20,000	8,000	12,000	
	2. CK-MB	40,000	16,000	24,000	
	3. CK-NAC	40,000	16,000	24,000	
	4. CPK/CK	40,000	16,000	24,000	
	f. Paparan Pestisida				
	1. Cholinesterase	70,000	28,000	42,000	
	g. Elektrolit				
	1. Natrium/ Na	30,000	12,000	18,000	
	2. Kalium/ K	30,000	12,000	18,000	
	3. Clorida/Cl	30,000	12,000	18,000	
	4. Calsium/ Ca	25,000	10,000	15,000	
	5. Magnesium/ Mg	30,000	12,000	18,000	
	6. Phosphor/ P	30,000	12,000	18,000	
	7. Fe	30,000	12,000	18,000	
	h. Urinalisa				
	1. Urinalisa Analyzer	15,000	6,000	9,000	
	2. Protein Bance Jones /ESBACH	15,000	6,000	9,000	
V	Pemeriksaan Laboratorium Dasar				
	A. Darah				
	1. Eritrosit	4,000	1,600	2,400	
	2. Lekosit hitung jumlah	4,000	1,600	2,400	
	3. Lekosit, hitung jenis	4,000	1,600	2,400	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
VI	Pemeriksaan Laboratorium Dasar				
	A. Darah				
	1. Eritrosit	4,000	1,600	2,400	
	2. Lekosit hitung jumlah	4,000	1,600	2,400	
	3. Lekosit, hitung jenis	4,000	1,600	2,400	
	4. Hemoglobin/ Hb, penetapan kadar	4,000	1,600	2,400	
	5. Hematokrit	15,000	6,000	9,000	
	6. Laju Endapan Darah/ LED	3,000	1,200	1,800	
	7. Penetapan Golongan Darah	3,000	1,200	1,800	
	8. Trombosit, hitung jumlah	15,000	6,000	9,000	
	B. Urine				
	1. Urine lengkap	10,000	4,000	6,000	
	2. Albumine Urine	2,000	800	1,200	
	3. Reduksi Urine	2,000	800	1,200	
	4. Bilirubin Urine	2,000	800	1,200	
	5. Urobiline Urine	2,000	800	1,200	
	6. Sediment Urine	2,000	800	1,200	
	7. Test Kehamilan/ PPT Test*	15,000	6,000	9,000	
	C. Faeces/ Tinja				
	1. Faeces Rutin	10,000	4,000	6,000	
	2. Benzidine Test/ Darah Samar	15,000	6,000	9,000	

Keterangan :

1. Pemeriksaan Kesehatan CJH Reguler diluar penunjang terdiri dari :
 - a. Rawat jalan dokter umum
 - b. Darah Rutin/Hematologi Analizer
 - c. Urine Rutin
 - d. Golongan Darah
 - e. Gula darah sewaktu
 - f. Test Kehamilan/ PP Test untuk perempuan
2. Pemeriksaan Kesehatan CJH Plus terdiri dari :
 - a. Rawat jalan dokter umum
 - b. Rawat jalan dokter spesialis luar
 - c. Darah Rutin/Hematologi Analizer
 - d. Urine Rutin
 - e. Golongan Darah
 - f. Gula darah sewaktu
 - g. Test Kehamilan/ PP Test untuk perempuan
 - h. Kolesterol total
 - i. Foto Rontgen
 - j. EKG
 - k. Suntik Vaksin Flu
 - l. Konsultasi Gizi
 - m. Test Kebugaran
2. Pemeriksaan Kesehatan Umrah terdiri dari :
 - a. Rawat jalan dokter umum
 - b. Rawat jalan dokter spesialis luar
 - c. Darah Rutin/Hematologi Analizer
 - d. Urine Rutin
 - e. Golongan Darah
 - f. Gula darah sewaktu
 - g. Test Kehamilan/ PP Test untuk perempuan
 - h. Kolesterol total

- i. Foto Rontgen
- j. EKG
- k. Suntik Vaksin Meningitis
- l. Suntik Vaksin Flu
- l. Konsultasi Gizi
- m. Test Kebugaran



WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN